



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.249 PEKANBARU28116
TELEPON 0761 22686 FAKSIMILI 0761 22647 WEBSITE www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/riau

Nomor : S - 1117 /WPB.04/2018

10 Agustus 2018

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau
Triwulan II tahun 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 1 dan 2
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 20710

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan II tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Tri Budhianto
NIP 19700108 199703 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJPb Prov. Riau | Ketua Tim:
Kepala Bidang PPA II | Editor: Solikhin, Henjang Prasetiawan |
Desain Grafis: Solikhin | Anggota: Jumihardi | Nurmiati | Ermaini |
Tsani Rozak Budiarto | Lely Anita

KANWIL DJTJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Riau



**KAJIAN FISKAL REGIONAL
PROVINSI RIAU
TRIWULAN II 2018**



DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	13
A. Pendapatan Daerah.....	14
B. Belanja Daerah.....	17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018.....	19
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	19
B. Pendapatan Konsolidasian	20
C. Belanja Konsolidasian	21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	23
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	24
A. Pemprov Riau Pastikan Ada Rasionalisasi Anggaran, Asumsi Pendapatan Tak Sesuai Perencanaan Awal.....	24
B. RTRW Provinsi Riau Disahkan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi ..	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kondisi ekonomi regional di Provinsi Riau triwulan II tahun 2018 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi 2,38% (*y-on-y*) dengan tingkat inflasi 3,32% (*y-on-y*), tingkat pengangguran terbuka 5,72%, dan tingkat kemiskinan sebesar 7,39%. Capaian pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target Pemda (RKPD), sedangkan indikator lainnya memiliki capaian yang sesuai dengan target RKPD maupun target nasional (RKP), kecuali tingkat kemiskinan yang masih belum sesuai dengan RKP.

Tabel Indikator Ekonomi Triwulan II 2018 beserta Target dalam RKPD dan RKP

Indikator Ekonomi	TW II	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (<i>y-on-y</i>)	2,38	3,07	3,73
Tingkat Inflasi (<i>y-on-y</i>)	3,32	4,58	4,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72	6,30	6,68
Tingkat Kemiskinan	7,39	7,40	6,35

Sumber: BPS Provinsi Riau, Bappenas, Bappeda Provinsi Riau

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

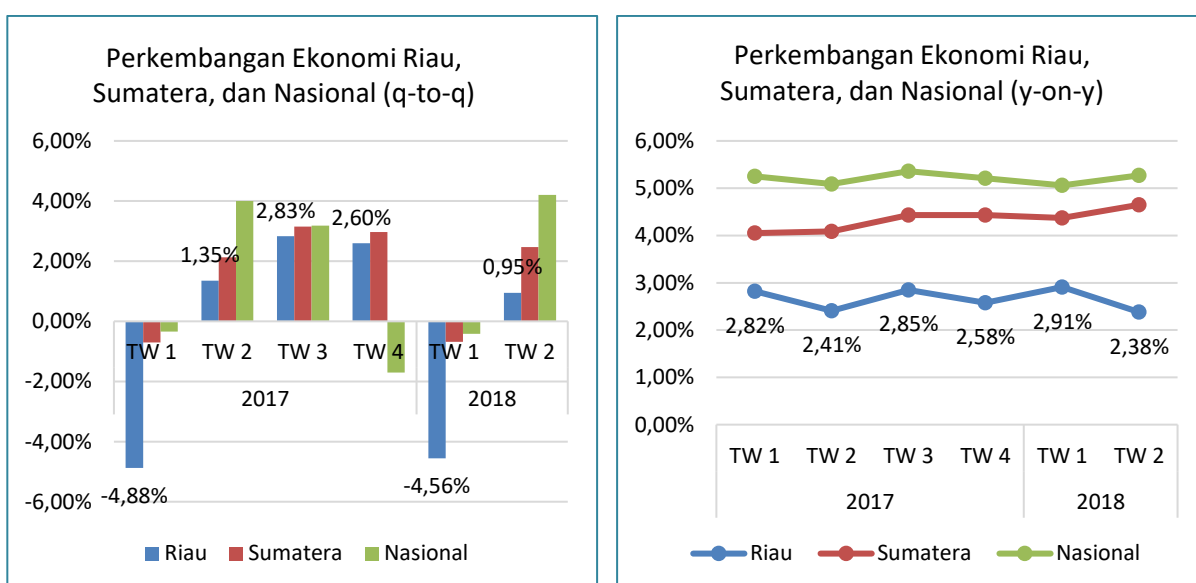
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2018 mencapai Rp188,28 triliun atau Rp28,28 juta perkapita. Angka ini merupakan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia dan terbesar di luar pulau Jawa dan secara spasial berkontribusi sebesar 23,36% dari total PDRB di Sumatera dan 5,03% terhadap perekonomian nasional. Penyumbang terbesar PDRB adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 28,38%, diikuti oleh industri pengolahan (23,86%) dan pertanian, kehutanan dan perikanan (22,39%). Ketiga lapangan usaha ini menjadi andalan perekonomian Riau dari tahun ke tahun karena besarnya hasil tambang minyak bumi dan gas alam, luasnya perkebunan kelapa sawit.

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 36,41%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 34,46%, dan Ekspor Barang dan Jasa (26,93%). Konsumsi rumah tangga ini didominasi konsumsi makanan, minuman, dan rokok dan konsumsi untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya. Penyumbang terbesar PMTB adalah investasi dalam bentuk bangunan dan pengeluaran untuk ekspor barang dan jasa berasal dari ekspor barang, sebagian besar berasal dari ekspor lemak dan minyak nabati/hewani dan minyak mentah.

Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan PDRB tumbuh Rp8,52 triliun atau 0,95% terhadap Triwulan II 2017 (*q-to-q*). Pertumbuhan dipicu peningkatan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,81%, sesuai dengan momen puasa Ramadan, lebaran, dan libur bersama di bulan Juni 2018. Selain itu, konstruksi juga tumbuh 5,64% sejalan dengan beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Riau. Namun, penyumbang terbesar PDRB justru

mengalami kontraksi, yaitu lapangan pertanian, kehutanan dan perikanan (minus 0,96%) dan Pertambangan dan Penggalan (minus 1,90%).

Secara tahunan ekonomi Riau tumbuh 2,38% (*y-on-y*), melambat dibandingkan triwulan II 2017 sebesar 2,49%. Perlambatan ini disebabkan pertumbuhan negatif dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan di level minus 5,53%. Berbeda dengan perlambatan perekonomian di Riau, perekonomian nasional dan regional Sumatera justru tumbuh lebih cepat, masing-masing dari 5,01% dan 4,09% pada triwulan II tahun 2017 menjadi 5,27% dan 4,65% di triwulan II tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Riau (*y-on-y*) berada di posisi terbawah pada tingkat regional Sumatera dan terbawah ketiga di tingkat nasional, serta masih berada di bawah target RKPD dan RKP tahun 2018.

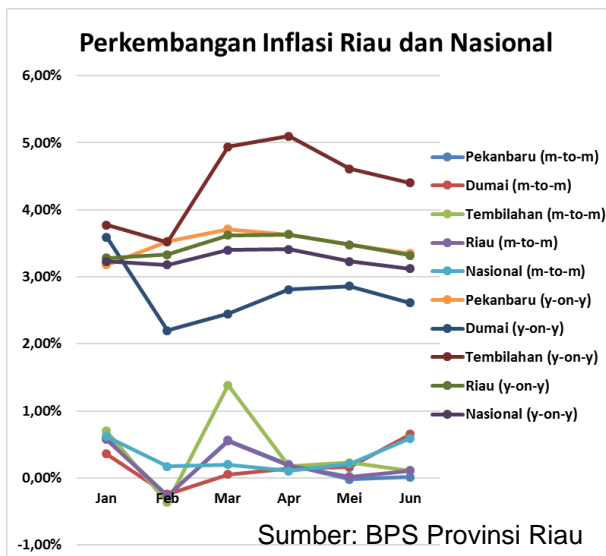


Sumber: BPS Provinsi Riau

B. Inflasi

Inflasi bulanan (*m-to-m*) di Provinsi Riau mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Tercatat inflasi tertinggi terjadi bulan Januari sebesar 0,57% dan deflasi tertinggi bulan Februari sebesar 0,27%. Sementara itu, inflasi bulanan pada akhir triwulan II tahun 2018 di Provinsi Riau mencapai 0,11%, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,59%. Dari tiga kota yang disurvei di Riau, inflasi di Kota Dumai berada jauh di atas tingkat inflasi Riau dan Nasional, yaitu sebesar 0,65% diikuti Kota Tembilahan 0,59%, sedangkan inflasi Kota Pekanbaru hanya 0,01%, berada di bawah tingkat inflasi Riau.

Penyumbang terbesar inflasi adalah kenaikan harga pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,84%, diikuti kelompok sandang 0,75% dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,69% bertepatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada bulan Juni 2018.

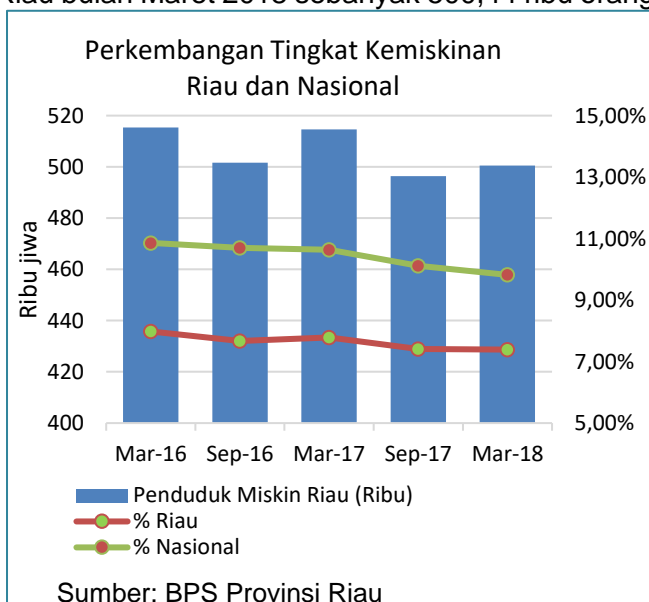


Inflasi tahunan (*y-on-y*) pada akhir triwulan II 2018 berada pada level 3,32%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada akhir triwulan II 2017 yang mencapai 3,62%. Inflasi ini berada di atas inflasi tingkat nasional yang hanya 3,12%, namun masih berada di ambang batas aman dan di bawah target RKP maupun RKPD tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 4,32% dan 4,58%.

C. Indikator Kesejahteraan

Penduduk miskin di Provinsi Riau bulan Maret 2018 sebanyak 500,44 ribu orang atau 7,39% dari total penduduk.

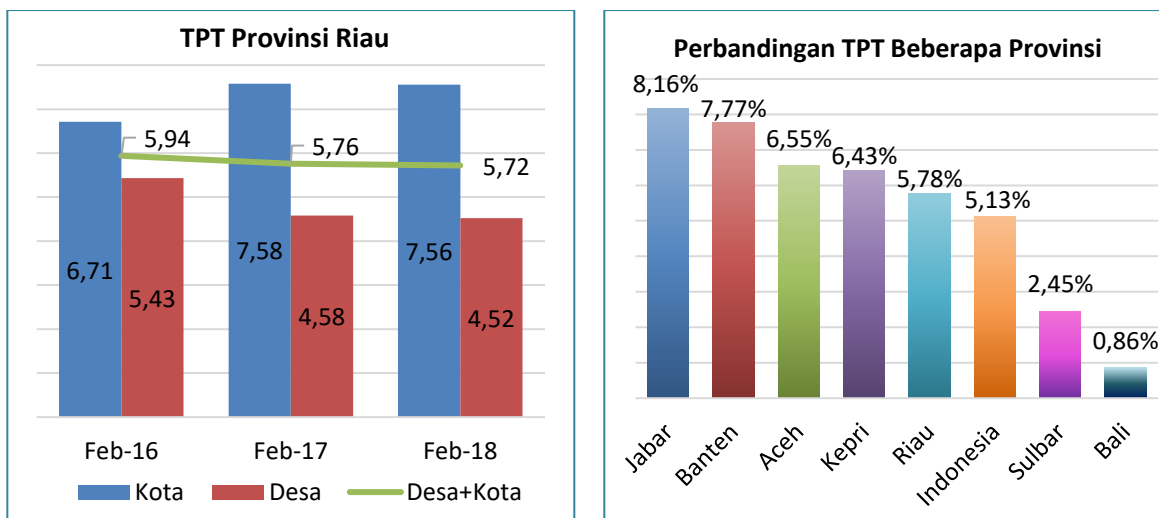
Kemiskinan di Riau tersebar di Perkotaan (6,35%) dan Pedesaan (8,09%). Jika dibandingkan pada Maret 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 14,18 ribu jiwa atau 0,39 poin. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional, dari 10,70% pada Maret 2017 menjadi 9,82% pada Maret 2018. Penurunan tingkat kemiskinan,



terutama di pedesaan diduga akibat peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak pengganda berhasilnya program pemerintah melalui penyaluran dana desa.

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau Februari 2018 sebanyak 3,30 juta orang, bertambah 167,86 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 188,41 ribu orang atau 5,72%, turun 0,04 poin dibandingkan tahun 2017. TPT di perkotaan 7,56%, lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yang hanya 4,52%. Hal ini mengkonfirmasi penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan sebagai dampak penyaluran dana desa. Angka TPT ini menduduki peringkat

ke-8 tertinggi di Indonesia dan ke-3 di Sumatera. Peningkatan angkatan kerja dan penurunan TPT sejalan dengan perekonomian di Riau yang tumbuh 2,38%.



Sumber: BPS Provinsi Riau

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2018 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp17,95 triliun dan pagu belanja sebesar Rp30,05 triliun. Target ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp17,68 triliun dan pagu belanja tahun lalu Rp28,99 triliun.

Tabel Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi Riau s.d. Triwulan II 2017 dan 2018 (miliar Rp)

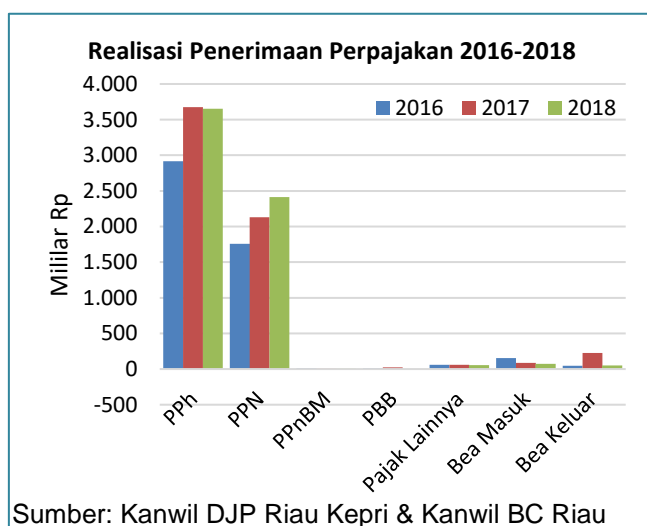
Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	17.681	6.641	37,56	17.945	6.508	36,27
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	17.595	6.606	37,54	17.945	6.508	36,27
1. Penerimaan Pajak	17.016	6.212	36,51	17.311	6.117	35,34
2. PNBP	601	395	65,72	634	391	61,67
II. HIBAH	64	35	54,69	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	28.990	14.569	50,26	30.055	11.944	39,74
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6.542	2.545	38,90	8.402	2.626	31,25
1. Belanja Pegawai	2.627	1.220	46,44	2.785	1.309	47,00
2. Belanja Barang	2.676	913	34,12	3.643	1.021	28,03
3. Belanja Modal	1.204	407	33,80	1.959	296	15,11
4. Belanja Bantuan Sosial	36	5	13,89	16	1	6,25
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
II. TKDD	22.447	12.024	53,57	21.653	9.318	43,03
1. Transfer ke Daerah	21.178	11.264	53,19	20.393	8.563	41,99
a. Dana Perimbangan	21.156	11.242	53,14	20.239	8.486	41,93
1) Dana Bagi Hasil	8.060	4.679	58,05	7.748	2.997	38,68
2) Dana Alokasi Umum	8.907	4.898	54,99	8.147	4.903	60,18
3) Dana Alokasi Khusus	4.188	1.665	39,76	4.344	586	13,49
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
c. Dana DIY	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	23	23	100,0	154	77	50,00
2. Dana Desa	1.269	760	59,89	1.260	756	60,00
SURPLUS (DEFISIT)	(11.309)	(7.928)	70,10	(12.110)	(5.437)	44,90

Sumber: SPAN, Kanwil DJP Riau Kepri, Kanwil DJBC Riau (diolah)

Realisasi pendapatan negara di Riau sampai dengan triwulan II 2018 mencapai Rp6,51 triliun, turun Rp0,13 triliun (2%) dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan realisasi belanja negara turun Rp2,63 triliun, karena adanya penurunan realisasi belanja pemerintah pusat Rp89 miliar dan penurunan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 2,71 triliun. Defisit pada triwulan ini sebesar Rp5,437 triliun, lebih kecil dibanding defisit tahun lalu sebesar Rp.7,93 triliun. Pendapatan negara di Riau berkontribusi sangat kecil terhadap pendapatan negara secara nasional yaitu 0,78% dari Rp833,45 triliun, sedangkan untuk belanja negara kontribusi untuk nasional sebesar 1,26% dari Rp944,01 triliun.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

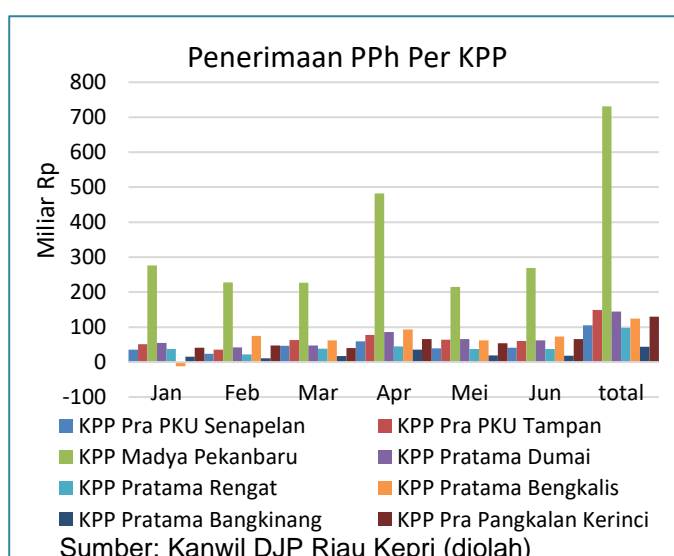


Sampai dengan akhir triwulan II 2018, penerimaan perpajakan di Riau dapat terealisasi sebesar Rp6,12 triliun atau 35,34% dari target Rp17,31 triliun. Realisasi ini turun Rp224,20 miliar (3,80%) dari tahun 2017. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp5,99 triliun dan pendapatan pajak internasional sebesar miliar. Realisasi pajak yang

masih jauh dari target ini dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau dan adanya peningkatan target pajak di Riau yang mengalami kenaikan sebesar 23%.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh sampai akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp3,65 triliun, menyumbang 58,52% dari total penerimaan perpajakan atau 38,96% dari targetnya Rp9,38 triliun. Realisasi ini turun Rp23,70 miliar atau 0,64% dibanding penerimaan periode yang sama tahun lalu Rp3.677 miliar.

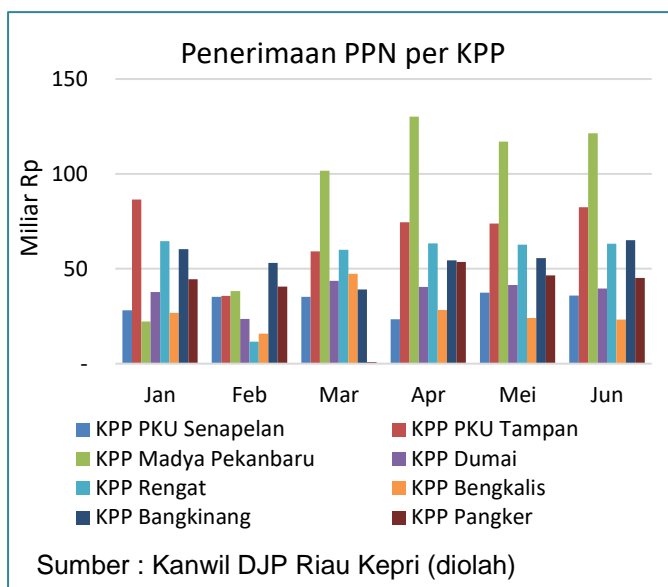


Penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp944,30 miliar karena merupakan periode penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau Kepri akan melakukan jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

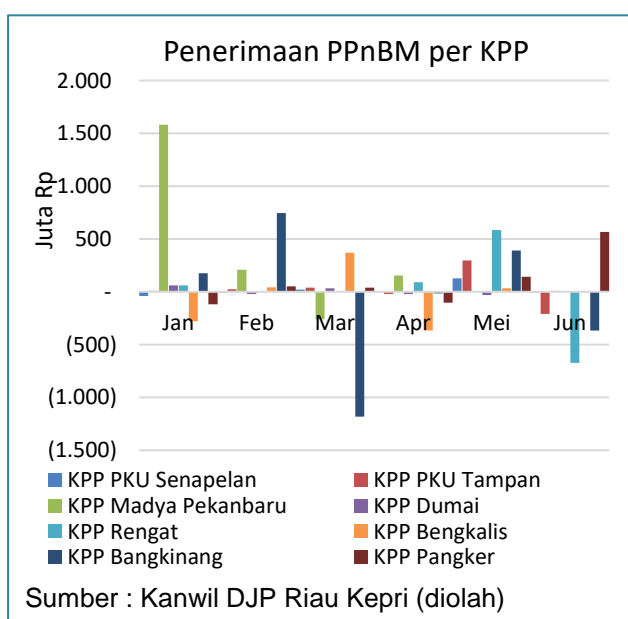
Realisasi PPN triwulan II 2018 sebesar Rp2,42 triliun (40,46%), meningkat 13,40% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp2,13 triliun.

Capaian tertinggi PPN terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar Rp181,46 miliar (17,94%), diikuti KPP Madya Pekanbaru Rp162,11 miliar atau 16,03%, dan KPP Pratama Bangkinang sebesar Rp152,50



miliar atau 15,07% dari total penerimaan. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Juni sebesar Rp476,24 miliar dengan penyumbang terbesar PPN dari kebutuhan pokok dan jasa transportasi dan komunikasi.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

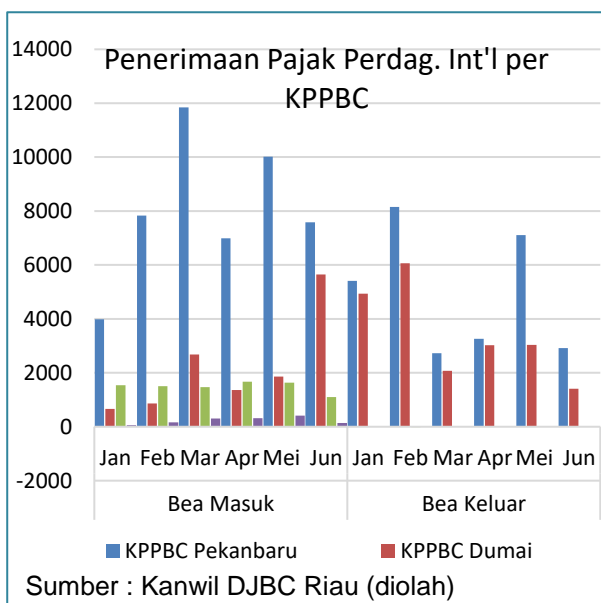


Penerimaan PPnBM terealisasi 15,79% (Rp2,15 miliar) dan hanya berkontribusi 0,03% dari total penerimaan perpajakan, turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 dan 2016 yaitu Rp5,90 miliar dan Rp10,62 miliar. Sebagian besar pendapatan PPnBM berasal dari KPP Madya Pekanbaru sebesar Rp1,70 miliar (78,83%). Penerimaan terbesar terjadi di bulan Mei sebesar Rp1,54 miliar.

Secara nasional pendapatan PPN dan PPn BM triwulan II tahun 2018 tumbuh 13,6% mencapai sebesar Rp218,1 triliun atau 40,1% dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir sebesar 8,0%. Hal ini mengindikasikan terjaganya daya beli masyarakat dan menunjukkan peningkatan volume perekonomian nasional.

d. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 mencapai Rp121 miliar atau 46,52%, terdiri dari penerimaan bea masuk Rp71,65 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp50,13 miliar. Penerimaan pajak ini berkontribusi 1,95% terhadap total penerimaan perpajakan yang sebagian besar berasal dari KPPBC Pekanbaru dengan total Rp77,84 miliar, diikuti KPPBC Dumai sebesar Rp33,63 miliar.



Penerimaan terbesar terjadi di bulan Februari senilai Rp24,57 miliar, diikuti penerimaan bulan Mei Rp24,07 miliar.

Pekanbaru, antaranews.com, Realisasi penerimaan pajak di Riau dan Kepri baru mencapai 41 persen dari target sampai akhir 2018 sebesar Rp23,93 triliun. Realisasi ini masih minim, dari target semester berjalan yang harusnya mencapai 50 persen. Penyebab minimnya realisasi penerimaan ini terpengaruh kondisi perekonomian Riau yang masih rendah selama semester I tahun 2018. Kendala pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, sebutnya menyebabkan penerimaan pajak sejak tahun lalu tidak tercapai. (dimuat tanggal 6/08/2018)

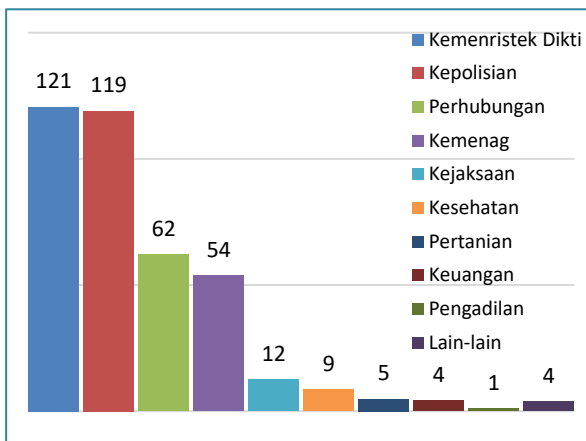
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai triwulan II 2018 berjumlah Rp390,94 miliar, berkontribusi 6,01% terhadap total pendapatan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai Rp394,64 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp214,19 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 176,75 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan administrasi dan penegakan hukum Rp119,48 miliar dan pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika Rp61,77 miliar. PNBP terbesar disumbang Ristek Dikti, Kepolisian, dan Perhubungan.

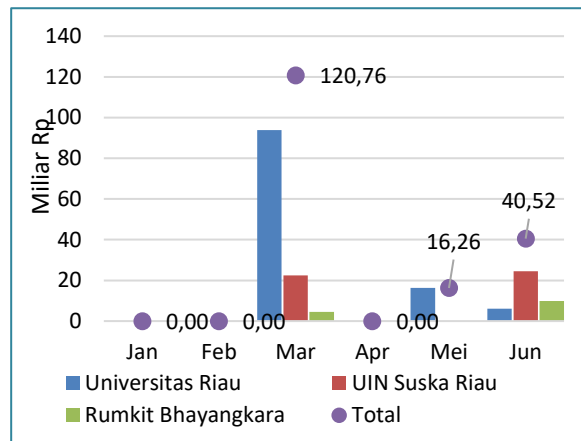
Pendapatan BLU tercatat Rp176,75 miliar atau 45,21% dari total PNBP, lebih rendah dari pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp179,25 miliar. Pendapatan

BLU terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp153,99 miliar yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau. Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp14,36 miliar berasal dari satker Rumkit Bhayangkara Pekanbaru.

Realisasi PNBP Menurut K/L (Miliar Rp)



Realisasi Pendapatan BLU per Satker



Sumber : OMSPAN (diolah)

kontan.co.id - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis realisasi penerimaan negara tahun 2018 akan melebihi target APBN Rp 1.894,7 triliun. Hal itu didorong oleh penerimaan PNBP dan penerimaan pajak. Tercatat, hingga 30 Juni, realisasi PNBP mencapai Rp 176,8 triliun atau 64,29% dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp 275 triliun. Angka itu juga naik 21,01% secara year on year (YoY). kenaikan PNBP ini didorong oleh harga komoditas yang tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. (dimuat tanggal 10 Juli 2018).

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan II 2018 realisasi pendapatan hibah sebesar Rp1,57 miliar atau hanya 0,63% dari total pagu. Kecilnya realisasi ini dikarenakan Satker penerima hibah masih banyak yang belum mengajukan pengesahan hibah ke KPPN.

Uraian	Target	Realisasi	%
Hibah			
Hibah Langsung	249.305.265.000	1.567.810.000	0,63
Total Hibah	249.305.265.000	1.567.810.000	0,63

Sumber: MEBE

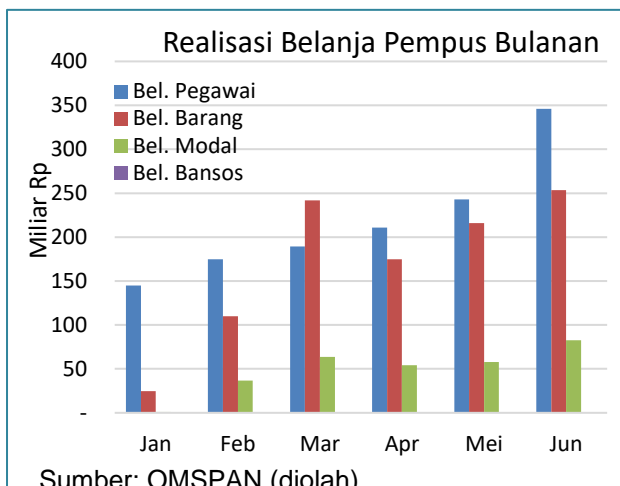
B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

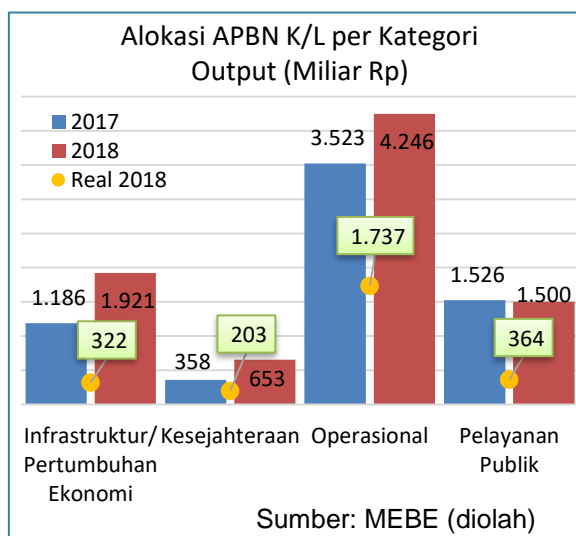
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan II tahun 2018 tercatat Rp2,62 triliun atau 31,06% dari pagu belanja Rp8,40 triliun. Angka tersebut di bawah target persentase penyerapan anggaran sebesar 40%. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,31 triliun (47,02%), belanja barang Rp1,02 triliun (28,01%),

belanja modal Rp295,95 miliar (14,71%), dan belanja bantuan sosial Rp542,90 juta (3,48%). Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Juni senilai Rp682,12 miliar. Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut mengalami peningkatan 3,18% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp2,55 triliun.



Dalam rangka mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara sesuai prioritas, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, tercermin dalam setiap tema yang diangkat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Berdasarkan kategori *output*, alokasi APBN dibagi menjadi empat kategori, yaitu



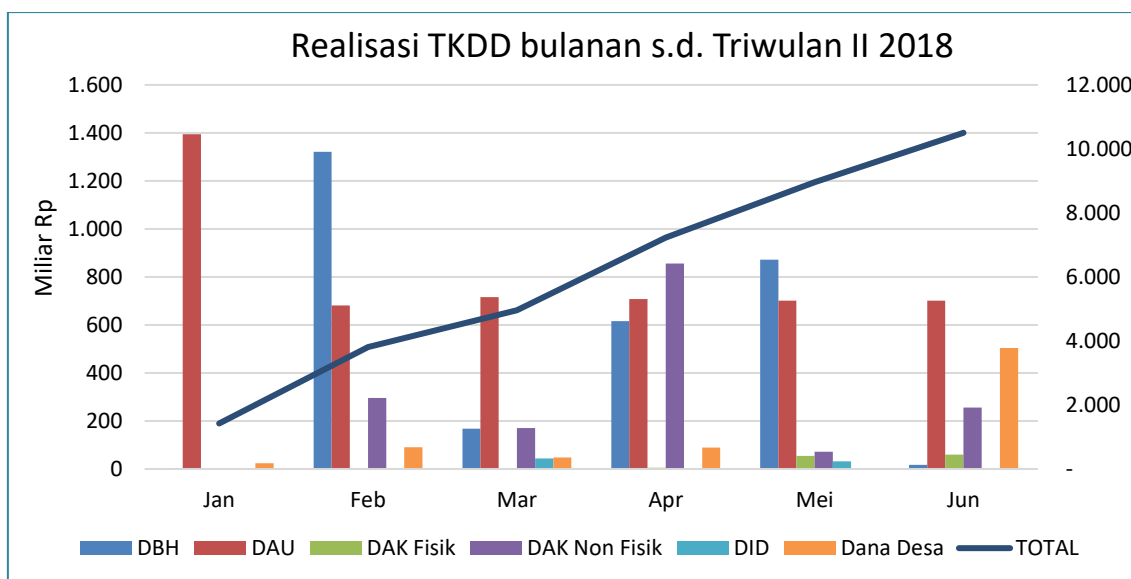
infrastruktur, kesejahteraan, operasional, dan pelayanan publik, terbesarnya adalah kategori operasional Rp4,25 triliun (51,03%), naik 20,52%. Anggaran infrastruktur sebesar Rp1,92 triliun, naik 62%, anggaran kesejahteraan naik 82% menjadi Rp653 miliar, sedangkan anggaran pelayanan publik justru turun 2% menjadi Rp1,50 triliun. Besarnya kenaikan persentase anggaran belanja infrastruktur dan kesejahteraan ini

mencerminkan perhatian sekaligus harapan yang besar dari pemerintah terhadap pembangunan insfrastruktur/ekonomi dan peningkatan kesejahteraan terutama di Riau.

Realisasi belanja tertinggi untuk operasional sebesar Rp1,74 triliun, 66,15% dari total realisasi atau 40,91% dari pagu. Sementara itu, belanja lainnya relatif kecil, terlebih belanja infrastruktur yang hanya terealisasi Rp322 miliar (16,76%). Secara umum permasalahannya adalah terkait perencanaan, pelelangan, pembebasan tanah, dan penetapan menteri atas proyek yang bernilai lebih dari Rp100 miliar. Jika ditinjau lebih lanjut permasalahan utamanya seputar aspek manajerial pengelolaan jadwal kegiatan.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pagu TKDD tahun 2018 di Provinsi Riau mencapai Rp21,65 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp22,45 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp9,32 triliun atau 43,03% dari total pagu. Jumlah ini berada di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,02 triliun. Angka penurunan terbesar disumbang oleh penurunan realisasi DBH hanya Rp2,99 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp4,68 triliun.



Sumber: Simtrada dan OMSPAN (diolah)

Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,90 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,99 triliun, dan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp586 miliar serta Dana Desa sebesar Rp756 miliar. Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan Februari dengan total realisasi sebesar Rp2,39 triliun yang disumbang oleh DBH dan bulan April sebesar Rp2,27 triliun karena adanya penyaluran DAK Non Fisik.

3. Pengelolaan BLU

Tabel Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II TA 2018 (dalam Miliar Rp)

Satker BLU	2017				2018					
	RM		BLU		RM		BLU		SBSN	
	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real
Universitas Riau	203	125	298	102	218	93	314	101	0	0
UIN Suska Riau	217	55	123	34	171	47	126	43	56	12
Rumkit Bhayang-kara PKU	5	2	14	0	5	2	21	8	0	0
TOTAL	419	182	435	135	395	142	462	152	56	12

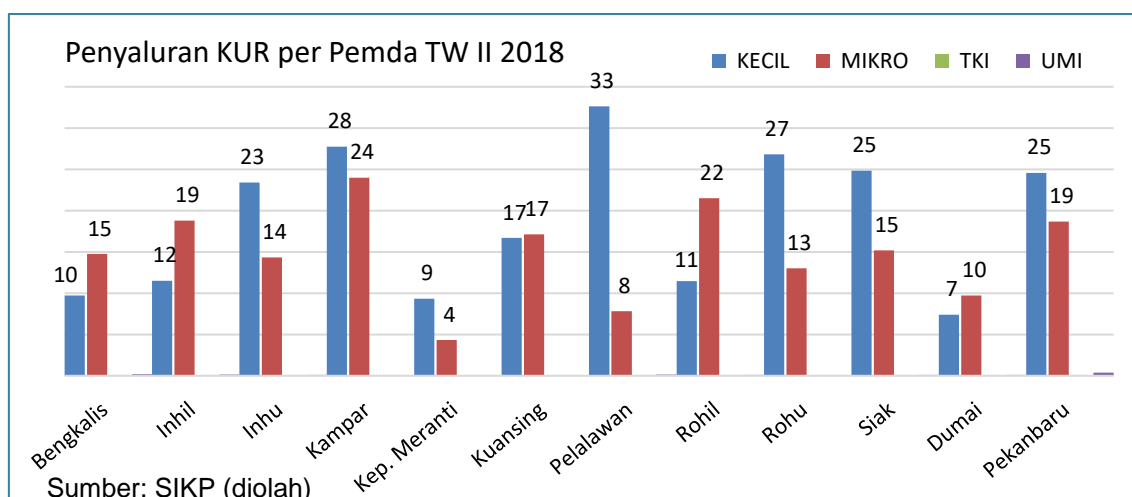
Sumber: MEBE, OMSPAN (diolah)

Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2018 sebesar Rp462 miliar. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, proporsinya terhadap total pagu belanja turun dari 50,94% menjadi 50,60%. Sampai dengan triwulan II 2018, realisasi belanja sumber BLU meningkat baik secara nominal maupun persentase, yaitu dari Rp135,25 miliar (31,12%) menjadi Rp152,25 (32,99%). Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai kebutuhannya semakin baik kedepannya.

4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan BUMD. Piutang negara yang berstatus aktif tersebar di lima debitur. Namun, saat ini hanya terdapat dua debitur yang masih mempunyai hutang kepada pemerintah pusat dengan total Rp20,41 miliar, sedangkan sisanya telah melunasi hutangnya.

Sementara itu, kredit program yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan Rp1,37 triliun, terbanyak adalah skema KUR Kecil sebesar Rp686,76 miliar dan KUR Mikro Rp678 miliar. KUR terbanyak ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah penyaluran Rp187,21 miliar dan Kota Pekanbaru sebesar Rp155,57 miliar.



C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan negara dan belanja negara yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2018 di Riau menggunakan analisis *forecasting* dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Perkiraan pendapatan negara mempertimbangan perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri serta perkembangan tingkat inflasi, sedangkan perkiraan belanja negara dipengaruhi kebijakan fiskal pemerintah, seperti program prioritas nasional pemerintah, nawacita, dan gerakan efisiensi belanja.

Pendapatan negara hingga akhir 2018 diperkirakan terealisasi Rp14,47 triliun (80,66%), meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang hanya 79,08%. Perkiraan kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang berada di level 2,38% (y-on-y). Sementara itu, belanja negara diprediksi terealisasi Rp28,41 triliun atau 95,50% dari pagu belanja dan berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 76,19%. Dalam melakukan prognosis realisasi belanja, telah diperhitungkan komponen TKDD, terutama tren DAU yang terealisasi 100% beberapa tahun terakhir dan realisasi DAK Fisik dengan memperhitungkan seluruh dana yang disalurkan pada tahap I dan nilai kontrak yang sudah diinput oleh Pemda sampai batas akhir penyampaian syarat dokumen. Berikut ini disajikan prognosis realisasi APBN lingkup Provinsi Riau sampai dengan akhir tahun 2018.

**Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Semester I		Perkiraan Realisasi s.d. TW IV	
		Rp	% Real	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Negara	17.945	6.508	36,27	14.474	80,66
Belanja Negara	30.055	11.944	39,74	28.413	95,50
Surplus/Defisit	(12.110)	(5.436)	44,89	(13.939)	118,06

Sumber: SPAN dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

**Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
PENDAPATAN	30.473	13.626	44,71	30.827	15.014	48,70
PAD	6.423	1.415	22,03	7.060	2.709	38,37
Pajak Daerah	4.337	719	16,58	4.799	1.896	39,51
Retribusi Daerah	385	72	18,70	359	97	27,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	393	165	41,98	418	223	53,35
Lain-Lain PAD yang Sah	1.308	459	35,09	1.485	494	33,27
Pendapatan Transfer	23.960	12.186	50,86	23.663	12.300	51,98
Transfer Pempus - Dana Perimbangan	19.623	10.041	51,17	20.961	11.025	52,60
Dana Bagi Hasil Pajak	5.148	2.139	41,55	4.348	694	15,96
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.774	2.759	73,11	4.151	2.915	70,22
Dana Alokasi Umum	8.117	4.679	57,64	8.387	5.715	68,14
Dana Alokasi Khusus	2.583	464	17,96	4.075	1.700	41,72
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.771	1.980	71,45	1.569	850	54,17
Dana Otonomi Khusus	83	50	60,24	-	-	-
Dana Penyesuaian	2.688	1.930	71,80	1.569	850	54,17
Transfer Pemerintah Provinsi	1.079	66	6,12	1.101	294	26,70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.079	66	6,12	1.101	294	26,70
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	488	98	20,08	32	131	409,4
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	488	98	20,08	32	131	409,4
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90	24	26,67	104	3	1,92
Pendapatan Hibah	33	17	51,52	104	-	0,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	57	8	14,04	-	3	-
JUMLAH PENDAPATAN	30.473	13.625	44,71	30.827	15.014	48,70
BELANJA	31.448	7.298	23,21	27.512	9.774	35,53
Belanja Pegawai	11.918	3.734	31,33	10.784	5.110	47,39
Belanja Barang	8.023	1.748	21,79	8.538	2.841	33,27
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	43	6	13,95	32	6	18,75
Belanja Hibah	1.400	249	17,79	2.167	1.038	47,90
Belanja Bantuan Sosial	76	4	5,26	78	5	6,41
Belanja Bantuan Keuangan	2.791	760	27,23	-	-	-
Belanja Modal	7.027	795	11,31	5.865	773	13,18
Belanja Tidak Terduga	170	1	0,59	48	1	2,08
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	1.665	122	7,33	4.541	1.240	27,31
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1.427	6	0,42	1.555	355	22,83
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.427	6	0,42	1.548	354	22,87
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	7	1	14,29
Transfer Bantuan Keuangan	238	116	48,74	2.986	886	29,67
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	643	771	119,9
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	238	116	48,74	2.337	114	4,88
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	6	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.113	7.420	22,41	32.053	11.014	34,36
SURPLUS/DEFISIT	(2.640)	6.206	(235)	(1.226)	4.000	(326)

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau

Sampai dengan triwulan II 2018, surplus anggaran mencapai Rp4 triliun, turun Rp2,21 triliun dibandingkan dengan triwulan II 2017. Penurunan surplus disebabkan peningkatan realisasi belanja yang lebih besar (12,31%) dibandingkan dengan peningkatan realisasi pendapatan yang hanya naik tipis 3,99%.

A. Pendapatan Daerah

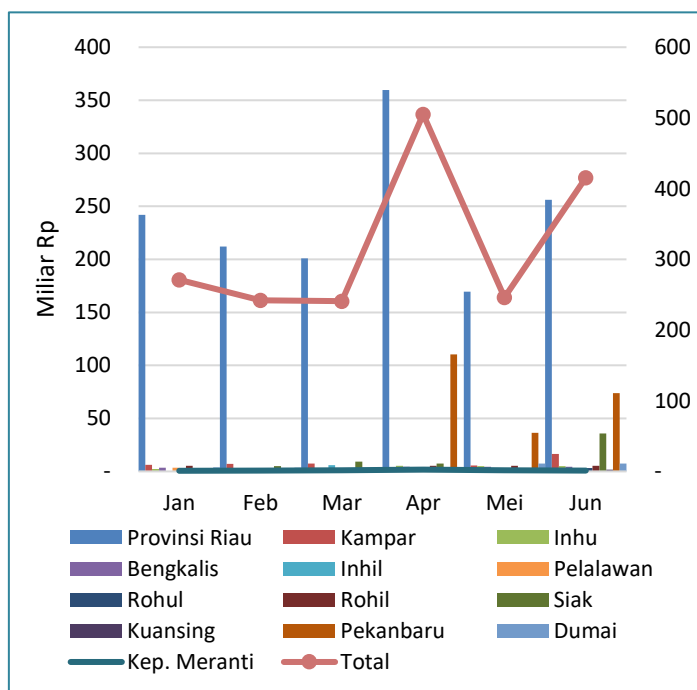
Pendapatan daerah terealisasi Rp15,01 triliun atau 48,70% dari target, naik tipis 3,99% dibandingkan triwulan II 2017. Kecilnya pertumbuhan realisasi pendapatan diduga karena adanya penurunan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 10% menjadi 5% dan juga belum diterimanya pendapatan DBH triwulan IV 2017 yang belum salur. Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp12,30 triliun (81,92%) dan pendapatan asli daerah senilai Rp2,71 triliun (18,04%).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD di Provinsi Riau sampai triwulan II 2018 terealisasi Rp2,71 triliun atau 38,37% dari target, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,42 triliun atau 22,03%. PAD terbesar disumbang oleh pendapatan pajak daerah yang mencapai Rp1,90 triliun atau 69,99% dari total PAD.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,90 triliun atau 39,5% dari target, didominasi penerimaan dari Pemerintah Provinsi Riau Rp1,44 triliun atau 75,90%, diikuti Kota Pekanbaru Rp186,56 miliar (9,80%). Penerimaan tertinggi terjadi di bulan April sebesar Rp505,19 miliar (26,59%).

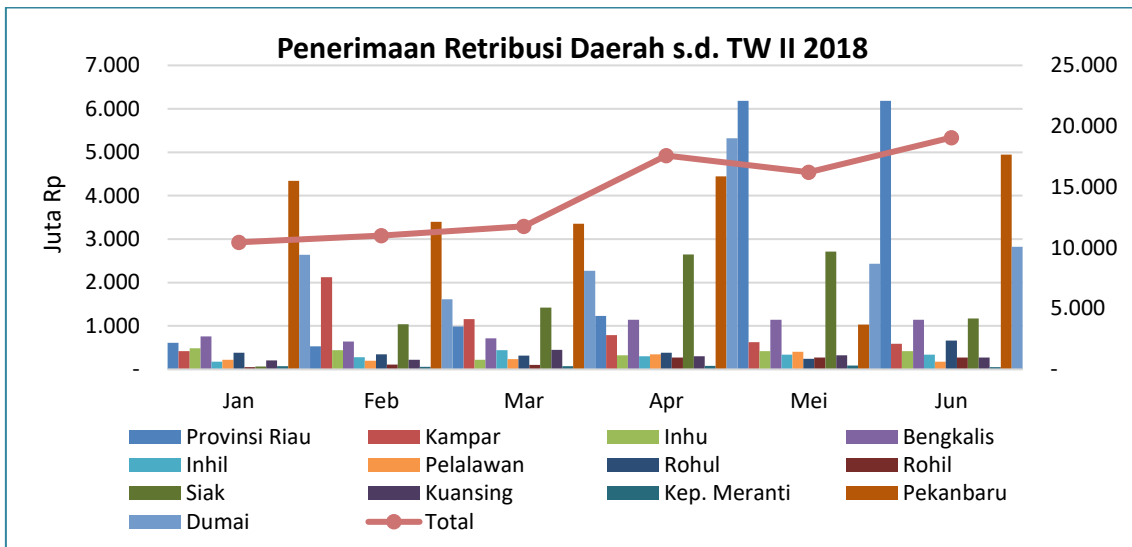


Realisasi pajak daerah tahun 2018 naik lebih dari 100% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya Rp719 miliar. Pendapatan ini berhasil digenjut oleh pemerintah daerah berkat adanya kebijakan baru dalam pemungutan pajak daerah, antara lain penerapan sistem *online* pembayaran pajak daerah, penambahan kantor layanan, dan pembentukan tim yustisi penagihan pajak.

Sumber: BPKAD (diolah)

b. Penerimaan Retribusi Daerah

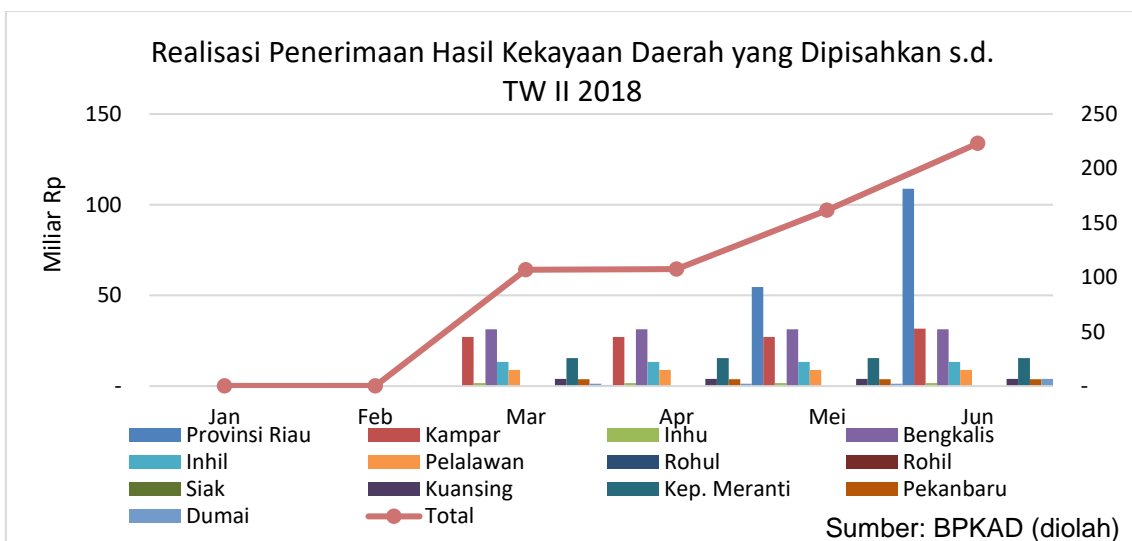
Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp96,60 miliar atau 26,90% dari target penerimaan, terbesar berada di Kota Pekanbaru Rp39,26 miliar (40,60%), sebagian besar terjadi di bulan Juni dengan total sebesar Rp21.52 miliar (54,80%). Retribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa usaha yang mencapai 55% dan retribusi jasa umum sebesar 26%.



Sumber: BPKAD (diolah)

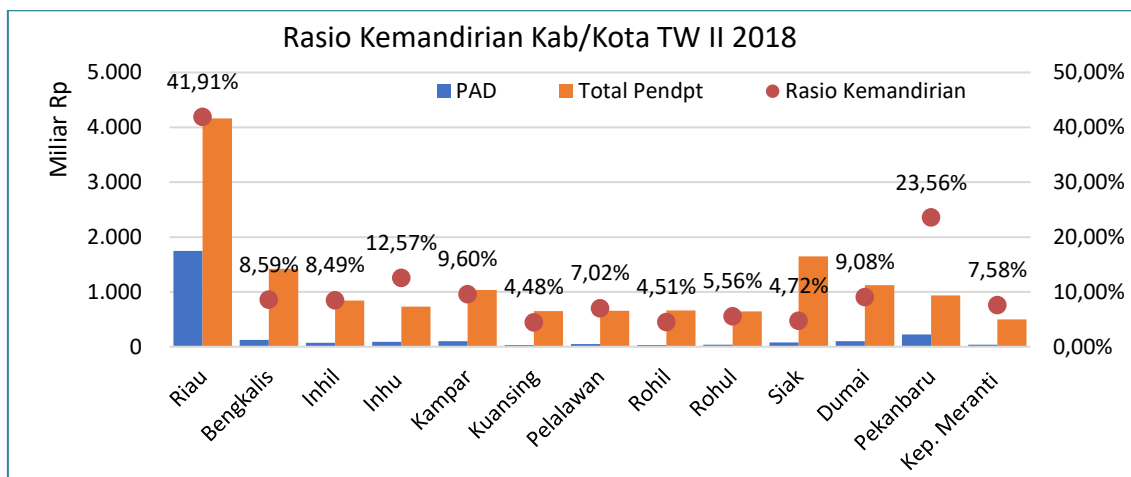
c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp222,93 miliar (53,30%) dari target, naik Rp58 miliar (35%) dibandingkan triwulan II 2017 dan sebagian besar berasal dari bagian laba BUMD (dividen) yang terealisasi di bulan Juni Rp61,28 miliar (24,5%). Penerimaan ini terbesar berada di Pemprov Riau Rp108.76 miliar (48,80%), diikuti Bengkalis Rp31.65 miliar.



Sumber: BPKAD (diolah)

Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 18% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (41,91%) dan terendah di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,48%.

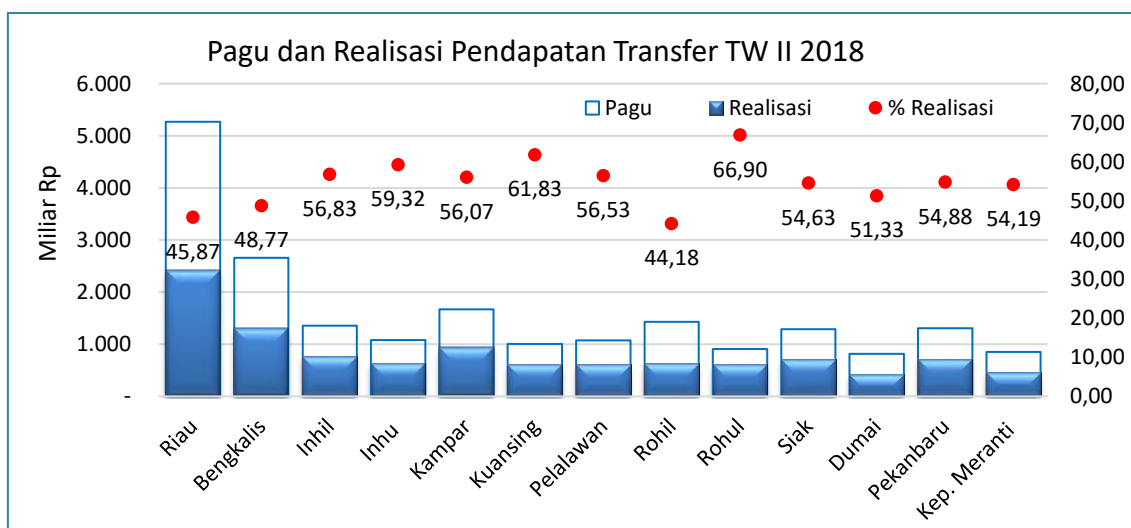


Sumber: BPKAD (diolah)

Pekanbaru.tribunnews.com. Pekanbaru – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau akhirnya menyetujui revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Poin penting perubahan Perda yakni tentang tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutama pada jenis Bahan Bakar Umum yaitu Pertalite yang awalnya 10% turun menjadi 5%, sehingga harga Pertalite di Provinsi Riau bisa bersaing dengan daerah lain.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer se-Riau tahun 2018 sebesar Rp23,66 triliun dan telah terealisasi Rp12,30 triliun (52%), terbesar berada di Pemprov Riau sebesar Rp2,41 triliun (10,22%) dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1,30 triliun (5,48%). Capaian realisasi dengan persentase terbesar berada di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 66,90% dan terendah di Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase realisasi 44,18%.



Sumber: BPKAD (diolah)

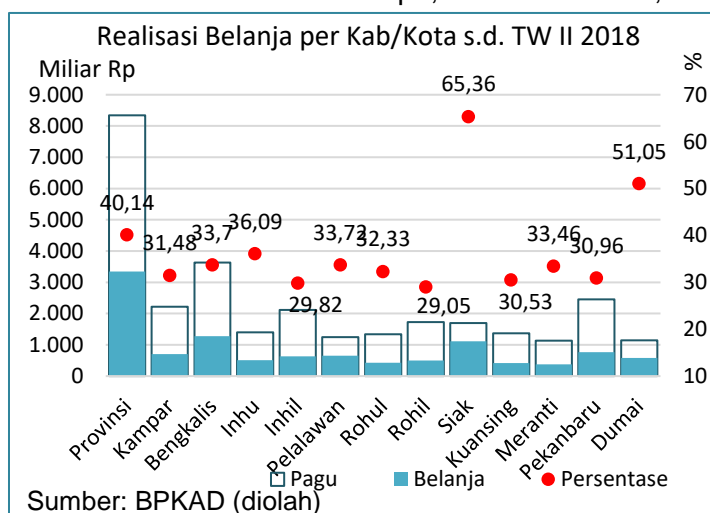
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp4,43 miliar (1,92%), yang sebagian besar merupakan pendapatan BLUD. Realisasi pendapatan ini berasal dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,54 miliar dan Kabupaten Pelalawan sebesar Rp2,89 miliar.

B. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah 2018 memberikan alokasi prioritas untuk sembilan program prioritas pembangunan, antara lain pembangunan infrastruktur; pembangunan SDM berkualitas melalui pendidikan; peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; penurunan angka kemiskinan; peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; peningkatan nilai budaya melayu; pembangunan pertanian dan perkebunan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan peningkatan iklim usaha dan investasi.

Belanja daerah di Riau triwulan II 2018 direalisasikan Rp9,77 triliun atau 35,53% dari pagu. Nilai tersebut naik 12,32% dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2017. Peningkatan terbesar ada pada belanja pegawai di mana pembayaran gaji ke-13 dan THR mendorong tingkat penyerapan ke level 47,39%. Selain itu belanja barang dan jasa juga meningkat 11,48%



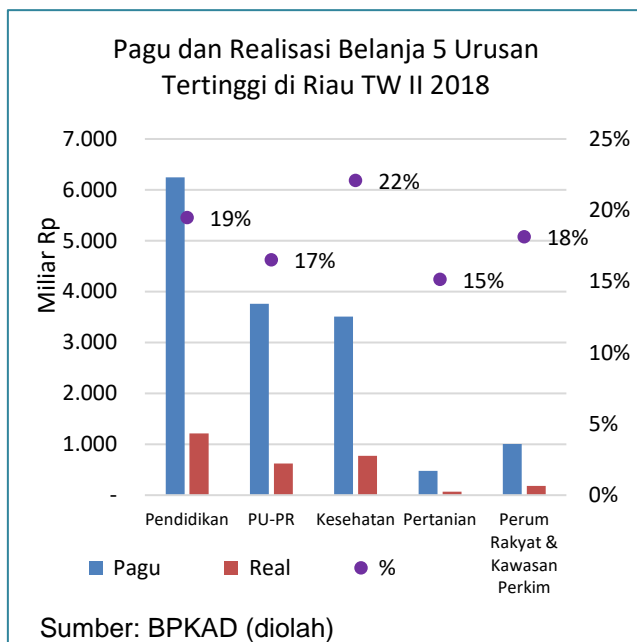
dibandingkan triwulan II tahun 2017, utamanya didorong oleh belanja operasional. Pemda diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja yang sangat besar terutama belanja untuk kepentingan publik, dengan tetap sesuai aturan berlaku, agar bisa mendorong lesunya pertumbuhan daerah.

Sampai dengan triwulan II 2018 pemda dengan tingkat penyerapan terbaik adalah Kab. Siak sebesar 65,36% dan Kota Dumai (51,05%). Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja anggaran dari masing-masing OPD untuk menggesa beberapa kegiatan yang menyangkut kepentingan publik.

1. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Belanja daerah per urusan terbesar digunakan untuk urusan pendidikan, mencapai Rp6,24 triliun (22,67%). Hal ini berarti pemerintah daerah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan pendidikan. Selain itu, pekerjaan umum dan penataan

ruang serta urusan kesehatan juga menjadi prioritas utama daerah dengan menyediakan sarana prasarana umum dan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu



urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan kesehatan juga menjadi prioritas daerah dengan pagu Rp3,76 triliun dan Rp3,51 triliun. Belanja urusan pendidikan sampai dengan triwulan II 2018 terealisasi Rp1,22 triliun (19,48%), sedangkan belanja urusan kesehatan Rp774,60 miliar (22,1%), dan realisasi terendah dari lima urusan teratas adalah urusan pertanian yang hanya Rp72,01 miliar atau hanya 15,13%.

2. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel Data BLUD di Provinsi Riau (dalam miliar Rp)

Nama BLUD	Pemda	Jumlah Pegawai		Total PNBP	Nilai Aset per 31-12-2017
		PNS	Non		
RSUD Arifin Ahmad	Riau	805	676	221.150	792.545
RSUD Petala Bumi	Riau	161	245	17.694	57.938
RS Jiwa Tampan	Riau	215	173	84.984	178.202
RSUD Bangkinang	Kampar	271	84	32.000	105.726
RSUD Mandau	Bengkalis	194	453	47.000	118.113
RSUD Bengkalis	Bengkalis	237	246	33.600	179.507
RSUD Indrasari	Indragiri Hulu	146	233	37.556	122.358
RSUD Raja Musa	Indragiri Hilir	24	98	3.773	21.260
RSUD Puri Husada	Indragiri Hilir	225	313	63.663	80.144
RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	19	104	1.036	14.273
RSUD Rokan Hulu	Rokan Hulu	173	356	37.335	3.538
RSUD DR Pratomo	Rokan Hilir	153	293	17.200	8.967
RSUD Tengku Rafi'an	Siak	172	448	23.621	48
RSUD Kep. Meranti	Kep. Meranti	88	326	16.692	99.828
RSUD Kota Dumai	Kota Dumai	294	467	78.085	157.776
Total		3.177	4.515	715.390,08	1.940.221

Sumber: Pemda (diolah)

Realisasi PNBP di Provinsi Riau tahun 2017 hanya berasal dari Pendapatan PNBP lainnya dan Pendapatan BLU. Pada tahun 2017 realisasi PNBP berjumlah Rp838,37 Miliar atau 36,81% dari target yang telah ditentukan. Dari data yang disajikan di atas, total pendapatan PNBP BLUD mencapai Rp715 miliar atau 85% dari total PNBP, dapat diasumsikan bahwa pendapatan BLUD mempunyai porsi yang signifikan.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2018 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp28,52 triliun atau 92,52% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp26,91 triliun atau 97,82% dari pagu belanja.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD se-Riau s.d. Triwulan IV 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Daerah	30.826,97	6.592,81	21,39	28.521,73	92,52
Belanja Daerah	32.053	11.014	34,36	26.912,27	97,82
Surplus/Defisit	(1.226,36)	4.000	(326)	1.609,46	131,24

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

Dalam melakukan prognosis realisasi pendapatan daerah, telah diperhitungkan komponen pendapatan dana perimbangan, terutama tren realisasi pendapatan DAU yang terealisasi 100% beberapa tahun terakhir dan realisasi pendapatan DAK Fisik dengan memperhitungkan seluruh dana yang disalurkan pada tahap I dan nilai kontrak yang sudah diinput oleh Pemda sampai batas akhir penyampaian syarat dokumen.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsol	Kenaikan	Konsol
Pendapatan Negara	6.508	14.717	10.721	32,42%	8.096
Pendapatan Perpajakan	6.117	1.896	8.013	21,41%	6.600
Pendapatan Bukan Pajak	391	813	1.204	(14,47%)	1.408
Hibah	-	2	2	-	-
Transfer	-	12.006*	1.502	1.598,23%	88
Belanja Negara	13.482	10.717	13.696	55,89%	8.786
Belanja Pemerintah	2.978	9.774	12.752	46,23%	8.721
Transfer	10.504*	943	943	1.352,36%	65
Surplus/(Defisit)	(6.974)	4.000	(2.975)	331,55%	(689)
Pembiayaan	-	257	257	(11,30%)	289
Penerimaan Pembiay. Daerah	-	277	277	(0,97%)	279
Pengeluaran Pembiay. Daerah	-	20	20	100,00%	10
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(6.974)	4.257	(2.718)	579,80%	(400)

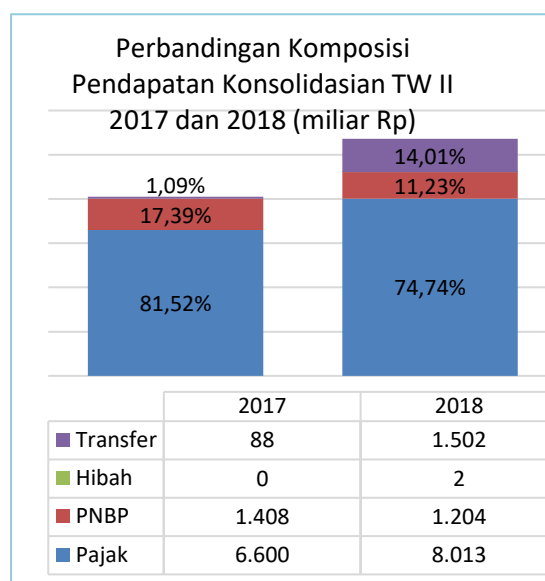
* pengeluaran transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan penerimaan transfer pemda
 Sumber: LKPK Triwulan II Tahun 2018 dan 2017 Provinsi Riau

Sampai dengan triwulan II 2018 pendapatan konsolidasian tumbuh 32,42% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja konsolidasian meningkat lebih tinggi sebesar 55,89%. Hal ini berakibat pada kenaikan defisit konsolidasian yang signifikan sebesar 331,55% menjadi Rp2,98 triliun, namun masih berada di level 1,58% dari total PDRB Riau triwulan II 2018. Kebijakan penurunan tarif pajak BBM dan tunda bayar DBH Migas menjadi salah satu penyebab kenaikan defisit dimaksud.

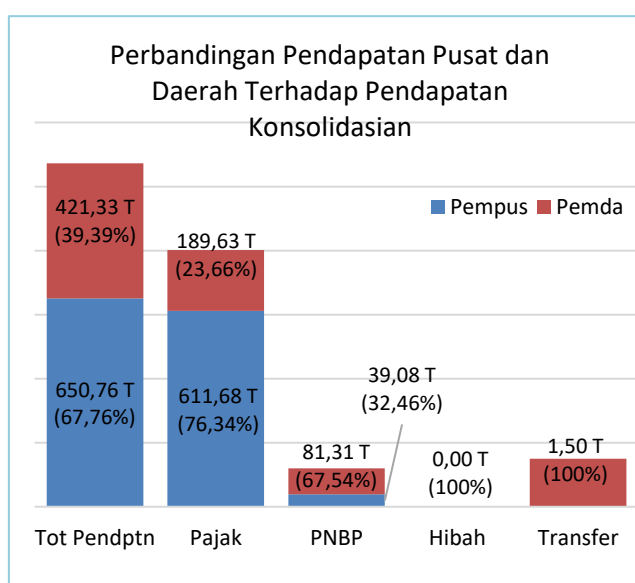
B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp10,72 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp8,01 triliun atau 74,74%, diikuti penerimaan transfer Rp1,50 triliun (14,01%) dan pendapatan bukan pajak konsolidasian Rp1,20 triliun (11,23%). Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan pajak yang menjadi penyumbang utama sebesar 21,41% dan penerimaan transfer yang naik lebih dari 10 kali lipat.



Sumber: LKPK TW II 2018 dan 2017 (diolah)

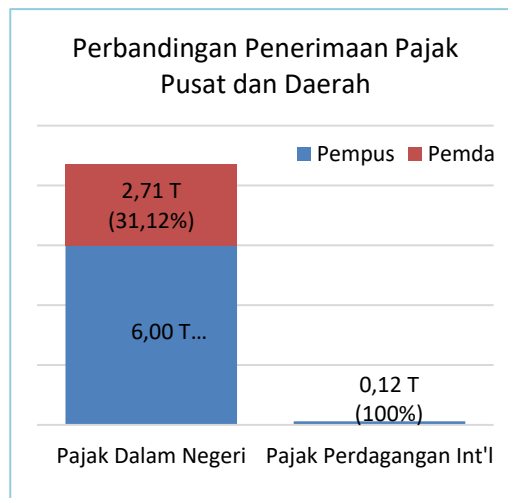


Sumber: LKPK TW II 2018 dan 2017 (diolah)

Pendapatan Konsolidasian berasal dari penerimaan pemerintah pusat Rp6,51 triliun atau 60,70%, terbanyak berasal dari pendapatan perpajakan Rp6,12 triliun (57,05%). Sementara itu, pendapatan daerah dengan porsi Rp4,21 triliun atau 39,30%, berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1,90 triliun (17,69%) dan pendapatan transfer Rp1,50 triliun atau 14,01% dari total pendapatan konsolidasian.

2. Analisis Perubahan

Peningkatan pendapatan konsolidasian sebesar Rp2,63 triliun atau 32,42% didukung oleh peningkatan pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp1,41 triliun (21,41%) dibanding triwulan II tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan konsolidasian disumbang oleh penerimaan pajak dalam negeri sebesar 74,74% yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 68,88% dan sisanya 31,12% dari pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan pajak internasional hanya menyumbang 1,51%.



Sumber: LKPK TW II 2018 Prov. Riau (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2018 (miliar Rp)

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	6.600	-12,74%	8.013	21,41%
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	1.408	1,54%	1.204	-14,47%
Pendapatan Hibah	-	0,00%	2	0,00%
Pendapatan Transfer	88	65,77%	1.502	1598,23%
Total Pendapatan	8.096	13,47%	10.721	32,42%
PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	171.470	2,41%	188.280	2,38%

Sumber: LKPK TW II 2018 dan 2017 (diolah)

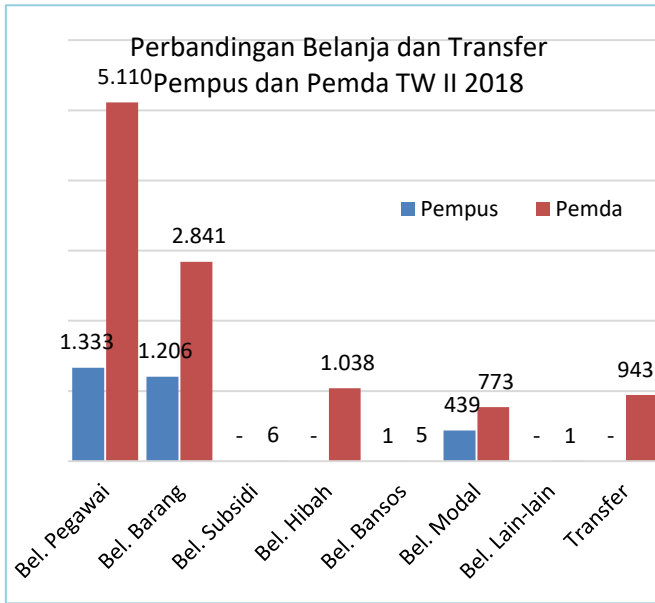
Apabila dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II tahun 2018 yang berada di level 2,38%, pendapatan konsolidasian yang terealisasi Rp10,72 triliun juga tumbuh 32,42%. Selisih angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya dampak yang positif dari efek pengganda pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan konsolidasian.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian triwulan II tahun 2018 Provinsi Riau mencapai Rp13,70 triliun dengan porsi terbesarnya adalah belanja pegawai sebesar 47,04%, diikuti belanja barang 29,55%. Sementara itu belanja modal hanya menyumbang porsi 8,85%. Belanja konsolidasian terbesar berasal dari belanja pemerintah daerah yang mencapai 78,25%, sedangkan belanja pemerintah pusat hanya memberikan andil 21,75%.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan konsolidasian, bila dibandingkan



periode yang sama tahun 2017 belanja konsolidasian mengalami peningkatan signifikan sebesar 55,89%, jauh lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan yang hanya 32,42%. Peningkatan belanja konsolidasian disebabkan adanya pertumbuhan seluruh jenis belanja. Hal ini memicu kenaikan defisit anggaran dari Rp689 miliar menjadi Rp2,98 triliun. Kenaikan defisit ini disebabkan jumlah belanja yang terus meningkat yang

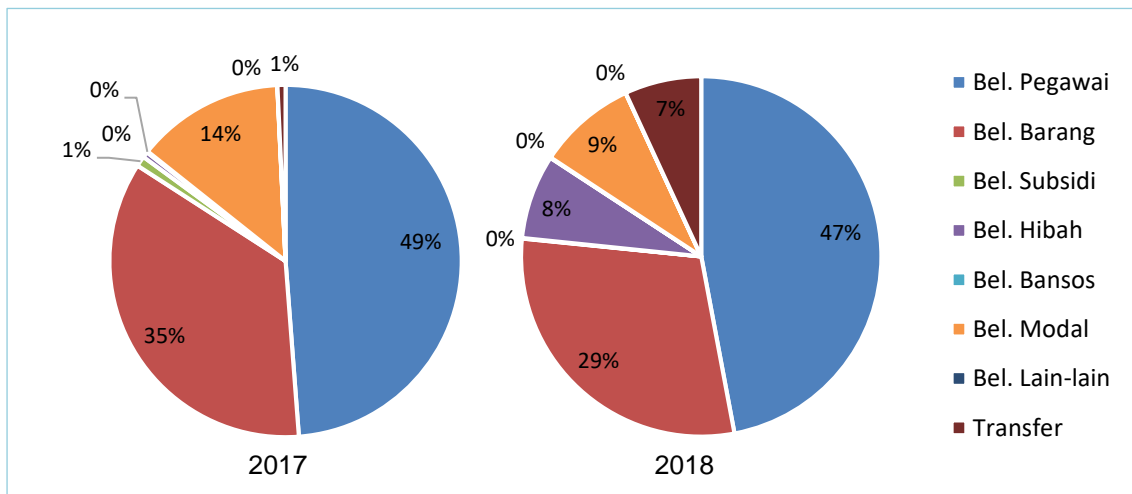
Sumber: LKPK TW II 2018 Provinsi Riau (diolah)

tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, namun besarnya defisit ini masih dalam batas aman di bawah 3% dari PDRB.

2. Analisis Perubahan

Komposisi realisasi belanja konsolidasian triwulan II 2018 berubah dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Pada 2018 porsi belanja belanja hibah dan transfer masing-masing meningkat menjadi 8% dan 7%, sedangkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal turun masing-masing sebesar 2%, 6%, dan 5%.

Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2018



Sumber: LKPK Triwulan II 2017 dan 2018 Provinsi Riau diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Apabila dibandingkan dengan PDRB Riau, belanja konsolidasian pemerintah mampu mendorong stimulus perekonomian regional, ditandai dengan adanya peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan TPT, serta peningkatan IPM yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2017 dan 2018

Indikator Ekonomi Regional	2017	2018
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	8.786	13.696
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,41	2,38
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	3,67	3,83
Tingkat Kemiskinan (%)	7,78	7,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,76	5,72
Indeks Pembangunan Manusia	71,20	71,79

Sumber: LKPK Triwulan II 2018 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Tabel Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau TW II 2018

Uraian	Jumlah
Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto	
Pendapatan:	25.763.864.687.579
Pajak	8.011.715.215.379
Kontribusi Sosial	-
Hibah	3.064.816.267.207
Pendapatan Lainnya	14.687.333.204.993
Beban:	14.044.315.474.496
Kompensasi Pegawai	6.542.645.052.905
Penggunaan Barang dan Jasa	3.887.108.304.417
Konsumsi Aset Tetap	-
Subsidi	6.388.208.195
Hibah	3.428.127.422.347
Manfaat Sosial	5.268.600.000
Beban Lainnya	174.777.886.632
Keseimbangan Operasi Bruto/neto	11.719.549.213.083
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	1.212.154.385.704
Aset Tetap	1.206.004.183.922
Perubahan Persediaan	-
Aset Non Produksi	6.150.201.782
Net Lending/Borrowing	10.507.394.827.379

Uraian	Jumlah
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	10.507.394.827.379
Akuisisi Neto Aset Keuangan	10.507.394.827.379
Dalam Negeri	10.507.394.827.379
Luar Negeri	-
Keterjadian Kewajiban Neto	-
Dalam Negeri	-
Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Triwulan II 2018 Provinsi Riau

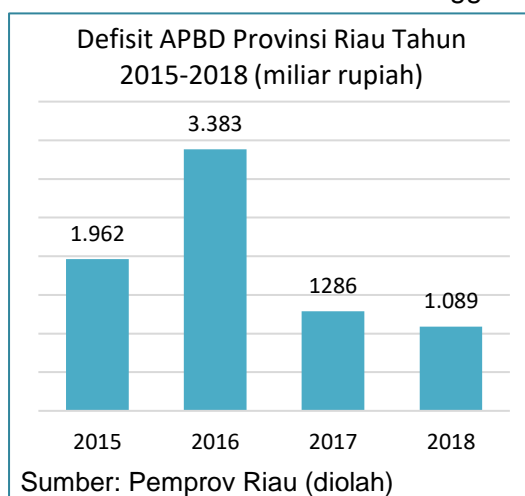
Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2018 sebesar Rp14,04 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 7,46% dari PDRB sebesar Rp188,28 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi PMTB sebesar 0,64%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp1,21 triliun.

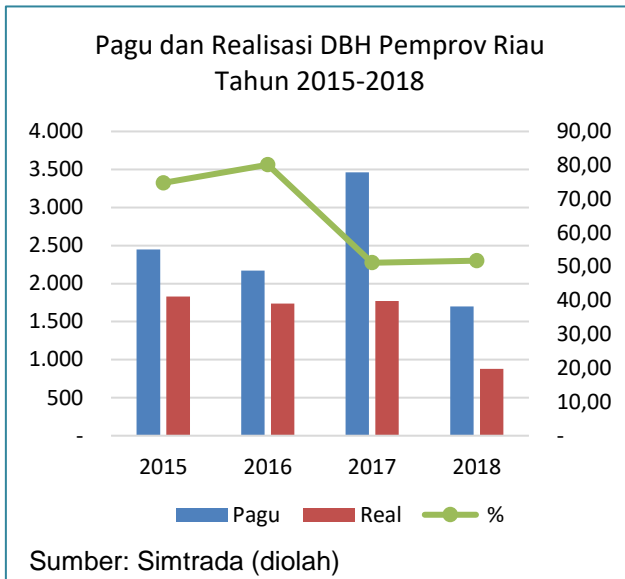
Kontribusi pemerintah dari konsumsi pemerintah memberikan pengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah berkontribusi lebih besar dibandingkan kontribusi dalam investasi. Hal ini sesuai dengan kondisi perekonomian di Riau yang tumbuh lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya, sehingga konsumsi pemerintah lebih dibutuhkan untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Pemprov Riau Pastikan Ada Rasionalisasi Anggaran, Asumsi Pendapatan Tak Sesuai Perencanaan Awal

Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 kembali melakukan rasionalisasi anggaran akibat adanya defisit keuangan yang diprediksi mencapai Rp1,089 triliun. Defisit tersebut pada APBD awal direncanakan ditutup dengan penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun 2017 sebesar Rp1,089 triliun. Namun karena serapan dan realisasi akhir tahun yang tinggi, akhirnya SiLPA tahun 2017 hanya tersisa Rp58 miliar. Hal ini mengakibatkan kegiatan yang telah dianggarkan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan, sehingga rasionalisasi menjadi opsi untuk menutup defisit tersebut.





Alasan lain di balik rasionalisasi anggaran tersebut adalah kebijakan tunda bayar DBH Pajak dan SDA selama beberapa tahun terakhir, sementara hal tersebut telah dianggarkan dalam APBD. Di samping itu, rasionalisasi juga disebabkan pendapatan daerah yang terus berkurang, terutama setelah disahkannya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) turun 10% menjadi 5% sesuai Perda

Nomor 15 Tahun 2018, dengan potensi kehilangan pendapatan Rp418,56 miliar. Dengan kondisi seperti ini, ke depannya Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko fiskal agar tidak menjadi beban Pemda pada akhir tahun, terutama beban atas tagihan-tagihan yang belum dapat dibayarkan. (Dimuat di pekanbaru.tribunnews.com pada Kamis (24/05/2018).

B. RTRW Provinsi Riau Disahkan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Setelah melalui proses panjang, akhirnya Kemendagri mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor Register Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Ranperda tersebut merupakan salah satu prestasi pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian di Bumi Lancang Kuning.

Dengan Perda RTRW tersebut, maka investasi yang selama ini terhambat peraturan RTRW diharapkan dapat digenjut guna menumbuhkan perekonomian dan investasi di Riau. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Riau jumlah investasi yang terhambat akibat belum tuntasnya RTRW Riau mencapai Rp53,9 Triliun yang terdiri dari Rp42,1 Triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp11,7 Triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun *multiplier effect* dari investasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 Triliun, dilihat dari dampak pergerakan ekonomi dan lainnya. (Dimuat di pekanbaru.tribunnews.com pada Kamis (19/04/2018).

